



# LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten tanjung jabung barat periode triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Tahunan yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) bulan mulai bulan Juli s.d September 2025. Laporan Pengukuran kinerja ini menjabarkan tentang informasi yang berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan dalam triwulan III.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Tanjung jabung barat Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Demikian laporan pengukuran kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reviu. Besar harapan kami hasil evaluasi yang membangun agar laporan pengukuran kinerja kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



NIP. 19821126 201001 1 015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap PD harus menyusun Laporan Kinerja. Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas kecamatan dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal – hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Laporan kinerja triwulan II adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan periode april – juni yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Tahunan Tahun 2023 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas.

### **1.3. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah Kecamatan Tahunan. Di mana Kecamatan Tahunan memiliki wilayah 15 Desa. Kecamatan Tahunan dipimpin oleh Camat Tahunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan pengukuran kinerja pertriwulan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja pertriwulan disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

**Tabel 2. 1 Pengukuran kinerja Eselon I**

| NO | SASARAN KINERJA  | INDIKATOR KINERJA   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET PROGRAM/KEGIATAN (TRIWULAN III) | PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN (TRIWULAN III) | CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (TRIWULAN III) | CAPAIAN ANGGARAN (TRIWULAN III) |
|----|--|---|--|--|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Tersedianya Perumahan Layak Huni   | Persentase Rumah Layak Huni dalam Lingkup Perumahan Swadaya                                       | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh   | 60%                                    | KEPALA DINAS     | 428,870,000             | 70%                                     | 312,000,000                     |
| 2. | Meningkatnya Infrastruktur dasar Perumahan dan Permukiman  | Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU   | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  | 70%                                    | KEPALA DINAS     | 140,354,650,210         | 76%                                     | 106,795,052,517                 |
|    |  | Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha                                      | Program Kawasan Permukiman   | 70%                                    | KEPALA DINAS     | 14,313,834,000          | 88%                                     | 12,611,851,228                  |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan, Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase registrasi dan sertifikasi yang di terbitkan sesuai ketentuan dan perundang - undangan | Pogram Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 50%                                    | KEPALA DINAS     | 1,811,000,000           | 0%                                      | -                               |



Tabel 2. 3 Pengukuran kinerja Eselon IV

| NO | SASARAN KINERJA  | INDIKATOR KINERJA                            | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                             | TARGET PROGRAM/KEGIATAN (TRIWULAN III) | PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN (TRIWULAN III) | CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (TRIWULAN III) | CAPAIAN ANGGARAN (TRIWULAN III) |
|----|--|--|--|--|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | 50%                                    | KEPALA DINAS     | 157.000.000             | -                                       | -                               |
| 2. | Melakukan Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan  | Tersusunnya laporan Keuangan OPD             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | 70%                                    | KEPALA DINAS     | 4.159.602.701           | 68%                                     | 2.810.154.640                   |
| 3. | Meningkatnya pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian | Tersediannya administrasi Kepegawaian daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 50%                                    | KEPALA DINAS     | 917.224.200             | 48%                                     | 441.718.400                     |
|    |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 70%                                    |                  | 14.514.200.000          | 73%                                     | 10.550.113.559                  |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Analisis**

- 1) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja masih belum sesuai dengan target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut di beberapa indikator belum memenuhi target. Hal ini disebabkan semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ketepatan waktu selesainya pelayanan perlu mendapat perhatian agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

- 2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten tanjung jabung barat. Sarana prasarana yang ada masih belum memadai, keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

- 3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Program penunjang sasaran strategis Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS Tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah adanya penundaan penggunaan anggaran yang disebabkan oleh likuiditas/tidak stabilnya keuangan daerah.

### **3.2. Capaian Rapat Evaluasi**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja.

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman melakukan rapat internal dan eksternal terkait laporan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil kinerja yang lebih optimal.



Hasil rapat evaluasi terkait Triwulan selanjutnya

1. pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan teralokasi dengan baik
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan yang belum mencapai target
3. terintegrasinya semua aspek
4. membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan III Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten tanjung jabung barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III tahun 2025

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan III Tahun 2025 Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten tanjung jabung barat beberapa indikator masih belum memenuhi target yang maksimal, mengingat beberapa kegiatan akan dilakukan pada triwulan keempat. selanjutnya hal ini akan menjadi acuan dan target yang harus dicapai setiap bidang untuk segera membuat rencana aksi agar kinerja tersebut terealisasi secara maksimal.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan Pengukuran kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**SYAFRUN, ST**  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19821126 201001 1 015



